

ABSTRAK

Beberapa kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan, mantan istri dan anak dalam tanggungan istri, menuntut haknya atas gaji suami atau tidak menuntut. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak isteri dan anak pasca perceraian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Grobogan ? (2) Apa Kendala dan solusi perlindungan hukum terhadap hak-hak isteri dan anak pasca perceraian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Grobogan ?

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut : (1) Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak-hak isteri dan anak pasca perceraian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Grobogan, (2) Mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi perlindungan hukum terhadap hak-hak isteri dan anak pasca perceraian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Grobogan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini adalah termasuk penelitian deskriptif analitis (*descriptive research*). Analisa data dilakukan ketika proses pengumpulan data telah diselesaikan, akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak isteri dan anak pasca perceraian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Grobogan, dapat disimpulkan: (1) Perlindungan hukum terhadap hak-hak isteri dan anak pasca perceraian telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, (2) Kendala dalam perlindungan hukum terhadap hak-hak isteri dan anak pasca perceraian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut: (a) Dokumen administrasi dalam proses pemotongan gaji yang tidak lengkap, (b) Gaji mantan suami tidak mencukupi, (c) Dalam putusan tersebut juga tidak tertera jumlah gaji yang mesti diperoleh.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Hak-hak Isteri dan Anak, Pasca Perceraian, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983*

ABSTRACT

Some cases of divorce Civil Affairs Officer in the Office of Religious Affairs Grobogan, ex-wife and children in a dependent wife, demanding their right to salary or not demanding husband. Based on the above description, the problem can be formulated as follows: (1) How does the legal protection of the rights of the wife and children after divorce based on Government Regulation No. 10 of 1983 in the Ministry of Religion Grobogan? (2) What barriers and solutions legal protection of the rights of the wife and children after divorce based on Government Regulation No. 10 of 1983 in the Ministry of Religion Grobogan?

The aim of this research can be described as follows: (1) Determine and analyze the legal protection of the rights of the wife and children after divorce based on Government Regulation No. 10 of 1983 in the Ministry of Religion Grobogan, (2) Determine and analyze the obstacles and solutions legal protection of the rights of the wife and children after divorce based on Government Regulation No. 10 of 1983 in the Ministry of Religion Grobogan.

This research is legal to use empirical juridical approach. Specifications of this research include descriptive studies (descriptive research). Data analysis is done when the data collection process has been completed, will be analyzed using qualitative descriptive analysis method.

Based on the results of research and discussion in the legal protection of the rights of the wife and children after divorce based on Government Regulation No. 10 of 1983 in the Ministry of Religion Grobogan, it can be concluded: (1) The legal protection of the rights of the wife and child of post divorce has been stipulated in Government Regulation No. 10 Year 1983 on Permit Marriage and Divorce For Civil Servants as amended by Government Regulation No. 45 of 1990 concerning Amendment to Government Regulation No. 10 Year 1983 on Permit Marriage and Divorce for the civil servants, (2) Constraints in the legal protection of the rights of the wife and children after divorce based on Government Regulation No. 45 of 1990 in the Environment Ministry of Religion Grobogan are as follows: (a) Document administration in the process of payroll deductions are not complete, (b) Salary ex-husband insufficient, (c) In the decision also indicated the amount of salary that must be obtained.

Keywords: *Legal Protection, Rights of Wife and Children, Post-Divorce, Government Regulation No. 10 of 1983*